



Kementerian PPN/
Bappenas

PEMUTAKHIRAN SASARAN INDIKATOR MAKRO DAERAH DALAM RANGKA PENYELARASAN RKP DAN RKPD 2025

Oleh: Tri Dewi Virgiyanti
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

Bali, 15 – 16 Mei 2024



1. Perencanaan RKP 2025 dalam kerangka **pencapaian Visi Indonesia Emas 2045**
 - Tahun pertama perjalanan panjang transformasi sosial-ekonomi-tata kelola Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas RPJPN 2025-2045
 - Titik tolak tahapan penguatan pondasi transformasi dalam jangka menengah RPJMN 2025-2029
2. **Perencanaan di masa transisi**
 - Memastikan kesinambungan pembangunan nasional dan daerah serta keberlangsungan pelayanan dasar (*baseline planning*)
 - Menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintahan baru

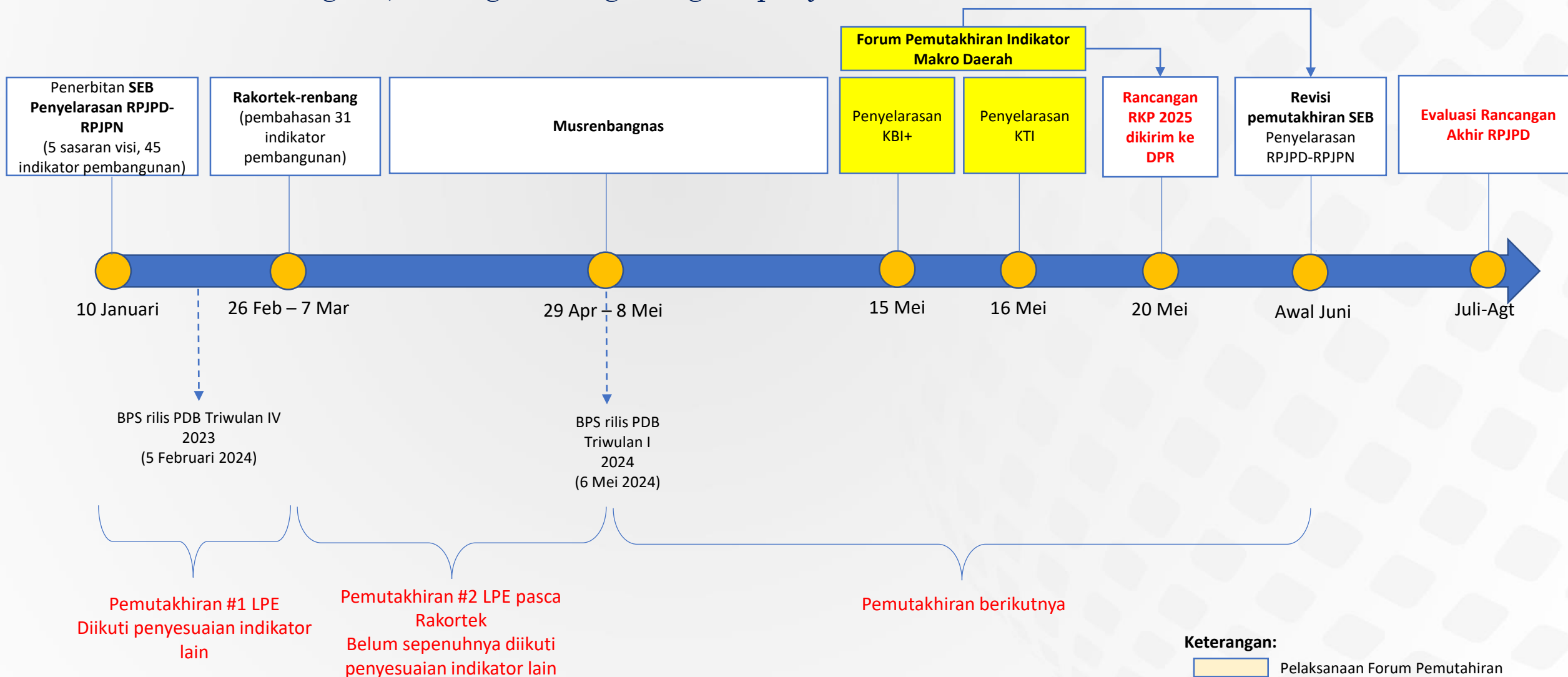


Kementerian PPN/
Bappenas



LINI MASA PERENCANAAN DAN PENYELARASAN SASARAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyelarasan sasaran indikator makro daerah dan nasional RKP/RKPD 2025 dilakukan Pasca Musrenbangnas, sekaligus sebagai bagian penyelarasan sasaran RPJMN/D dan RPJPN/D





- Pada Rakortekrenbang Februari-Maret yang lalu dilakukan pembahasan 31 indikator pembangunan
 - termasuk 6 indikator makro yang akan digunakan dalam RKP 2025
 - Belum mencakup semua indikator pembangunan dalam Lampiran SEB Penyelarasan RPJPD dan RPJPN 2025-2045 (45 + 5)
- Terjadi pemutakhiran di beberapa indikator, yang dituangkan dalam Berita Acara
- **Namun belum semua 38 provinsi mencapai kesepakatan untuk 6 indikator utama (tabel di samping)**
- Fokus pembahasan pada Forum ini untuk memutakhirkan dan menyepakati 6 Indikator Makro Daerah karena **Rancangan RKP akan diserahkan ke DPR tanggal 20 Mei 2024**
 - Sedangkan untuk indikator lengkap dalam Lampiran SEB (45 + 5) direncanakan pembahasan lanjutan pada Bulan Juni.

**TABEL STATUS UPDATE INDIKATOR MAKRO DAERAH
PADA RAKORTEKRENBANG**

No.	Indikator	Jumlah provinsi yang belum mencapai kesepakatan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	13
3.	Persentase Penduduk Miskin	8
4.	Rasio Gini	8
5.	Indeks Modal Manusia	2
6.	Emisi Gas Rumah Kaca*	11

**Catatan: Pasca Rakortekrenbang dilakukan Rakor Provinsi-Bappenas, jumlah masih menggambarkan posisi Rakortekrenbang*



MEGATREND

PERSPEKTIF NASIONAL:

- *Bird view* - makro nasional
- Interaksi dan interdependensi antar daerah (*inter-regional linkages*)
- Aspek-aspek kewenangan mutlak pemerintah pusat
- Potensi permintaan (*demand*) dan risiko di tingkat global dan nasional

Sinkronisasi
Sasaran
Pembangunan
dan Arah
Kebijakan

PERSPEKTIF DAERAH:

- Kondisi lapangan – makro & mikro daerah
- Potensi keunggulan lokal
- Aspek-aspek kewenangan daerah (desentralisasi)
- Daya saing relatif di tingkat nasional
- Kerjasama antardaerah

FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN (1)



1. Pentingnya **mengenali peluang** dan **antisipasi/mitigasi risiko** di tengah tingginya ketidakpastian
 - a) Eksternal: transmisi dampak perang di Eropa Timur dan Timur Tengah pada ketahanan pangan dan energi nasional-lokal
 - b) Dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrem yang berpengaruh pada produktivitas pertanian & perikanan, kenaikan muka air laut dan ancaman abrasi, serta bencana hidrometeorologi lainnya
 - c) Tantangan transmisi kebijakan pemerintahan baru dan dinamika di daerah menjelang Pilkada serentak
 - d) Tantangan sekaligus peluang otomasi industri dan pemanfaatan kecerdasan buatan: daya serap tenaga kerja berkurang, di sisi lain lapangan usaha baru
 - e) Peluang relokasi investasi dan industri, siklus inovasi dan tren produk/gaya hidup baru.

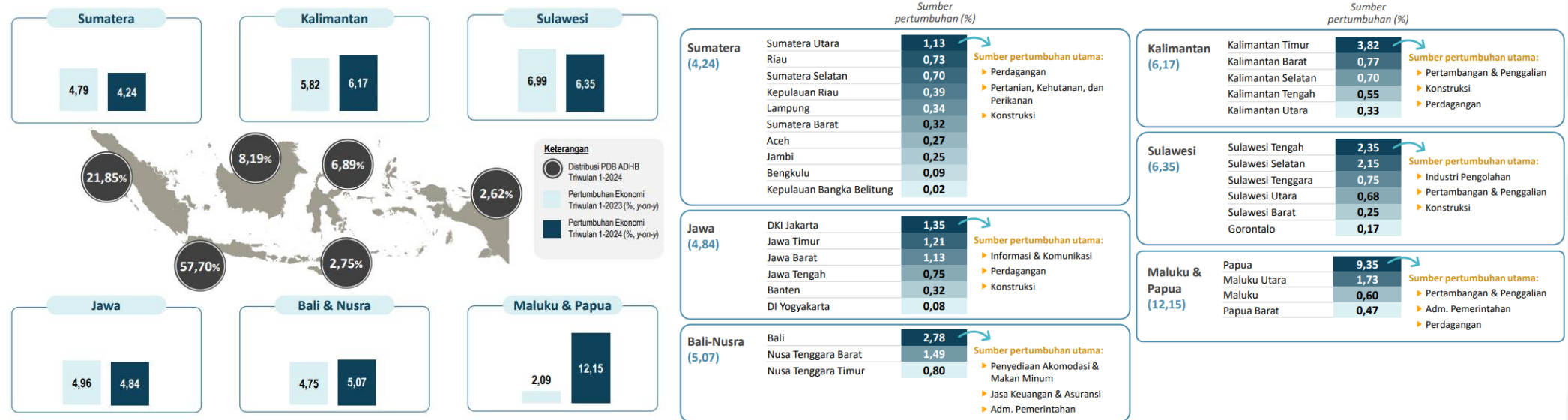
FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN (2)



2. Penetapan sasaran pembangunan daerah perlu memperhitungkan seluruh potensi sumberdaya yang dapat dimobiliasi ke daerah
 - a) Pentingnya **harmonisasi** berbagai sumber pendanaan pemerintah pusat, dana transfer daerah, dan dana masyarakat/dunia usaha/BUMN
 - b) Pentingnya meningkatkan kualitas belanja dan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
 - c) Memanfaatkan **belanja pemerintah daerah dan pusat yang terbatas sebagai pemancing** investasi swasta dan masyarakat yang lebih besar
 - d) Untuk usulan-usulan daerah yang bersifat strategis dan urgen namun merupakan kewenangan daerah perlu disalurkan dalam skema DAK
 - e) Tantangan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan inovatif dan peran pendanaan Non APBN/APBD

FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN (3)

PEREKONOMIAN WILAYAH TRIWULAN I 2024: WILAYAH TIMUR MENGALAMI PERTUMBUHAN LEBIH TINGGI



Sumber: Badan Pusat Statistik (Mei 2024)

3. Realisasi PDRB Triwulan I mengarah pada pola dan *trajectory* jangka panjang yang diharapkan:
- Kinerja perekonomian KBI relatif terjaga dengan sumber pertumbuhan sektor-sektor jasa dan konstruksi
 - Akselerasi pertumbuhan di KTI dengan sumber pertumbuhan sektor-sektor SDA, industri pengolahan berbasis SDA (hilirisasi), dan konstruksi
 - Peluang sumber-sumber pertumbuhan baru di berbagai wilayah: ekonomi kreatif & digital, ekonomi biru, produk manufaktur ramah lingkungan, pariwisata (naik kelas).

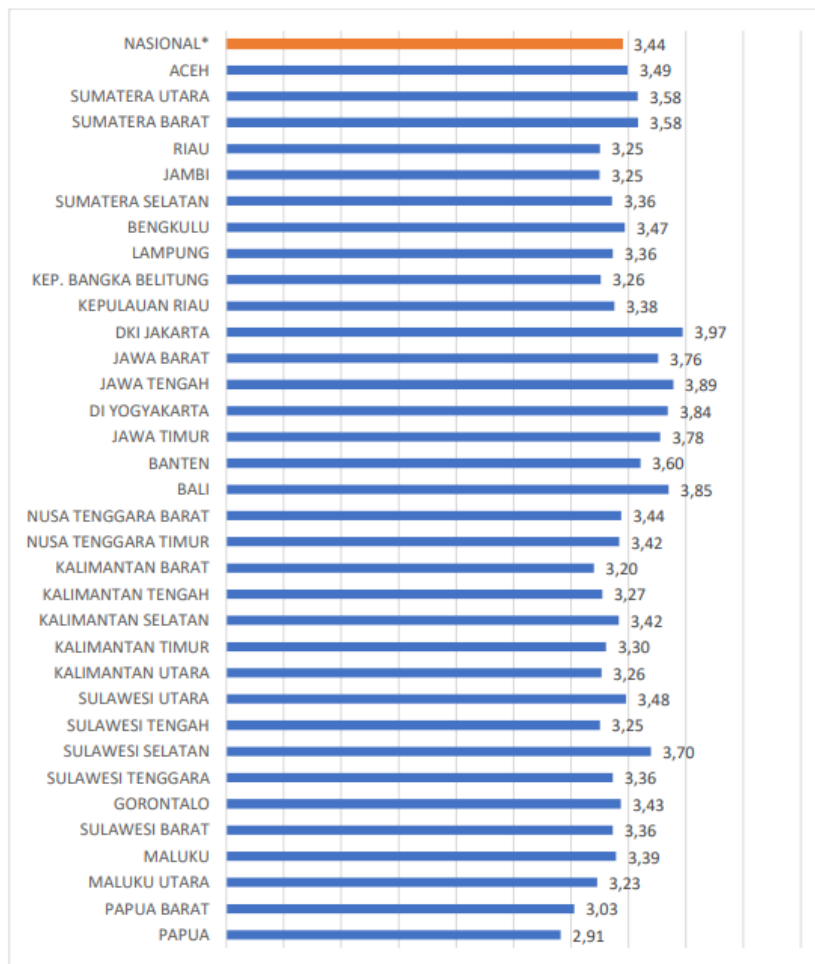
FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN (4)

SKOR IDSD PROVINSI-2023

3,44

SKOR IDSD 2023
NASIONAL*

14

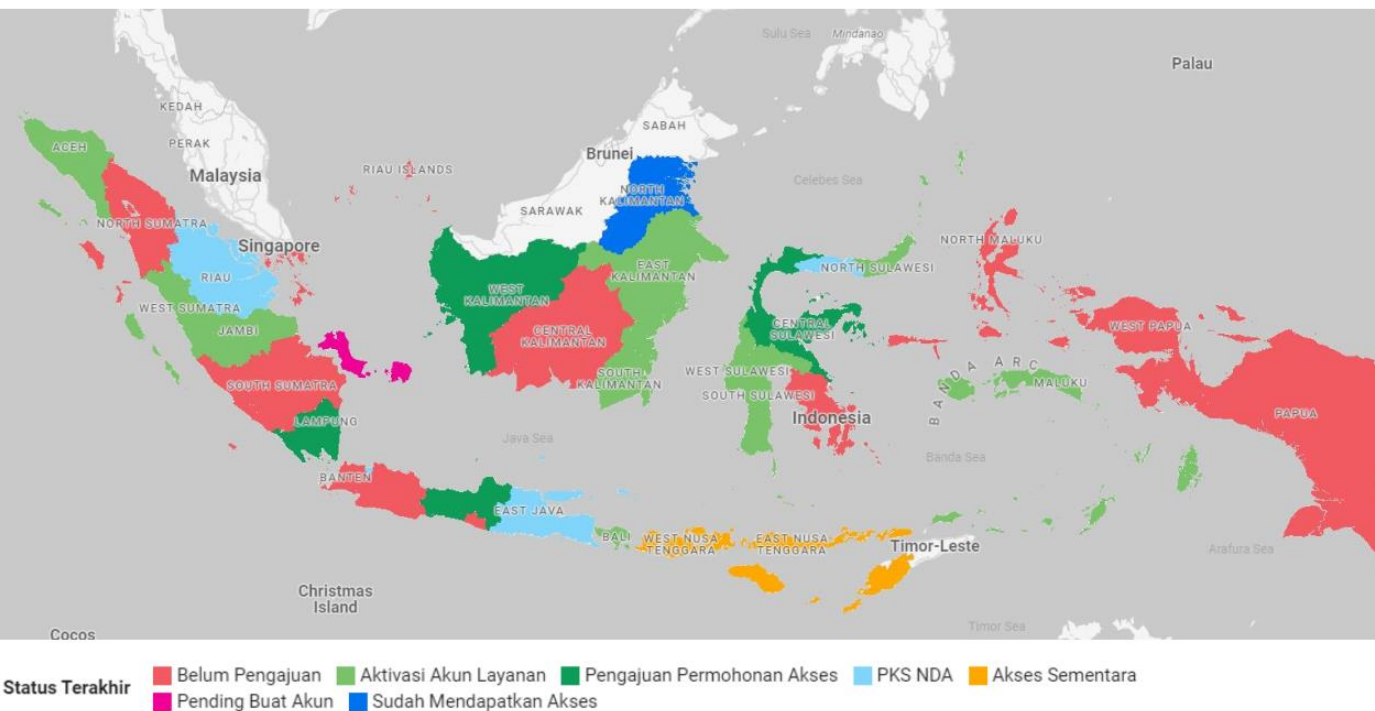
PROVINSI
≥ skor nasional

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023 (BRIN, 2024)

4. Perbaikan Daya Saing Daerah perlu dilakukan terus-menerus
 - a) Publikasi BRIN (2024): Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencerminkan potensi tingkat produktivitas daerah yang selanjutnya menjadi determinan standar kualitas hidup masyarakat
 - b) IDSD dibentuk oleh 4 komponen (diadopsi dari *Global Competitiveness Index*): Lingkungan Pendukung, Kualitas SDM, Pasar, dan Ekosistem Inovasi
 - c) Dari 14 provinsi yang memiliki IDSD di atas rata-rata nasional (3,44 skala 5), 11 berada di KBI dan 3 di KTI
 - **Persentif tantangan:** perlu kerja keras peningkatan daya saing khususnya di Kawasan Timur
 - **Perspektif peluang:** masih terbuka lebar potensi untuk percepatan pertumbuhan pendapatan di Kawasan Timur

FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN (5)

Peta Progress Permohonan Hak Akses Regsosek (Pemerintah Daerah)



Sumber: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS (Mei 2024)

5. Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah dan lintas K/L dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan
 - a) Intervensi pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementerian, ditambah inisiatif pemerintah daerah
 - b) Sangat penting menggunakan **data acuan yang sama (terpadu) untuk meningkatkan akurasi sasaran** (kesesuaian target rumah tangga dan jenis intervensi)
 - c) Pemerintah melalui BPS telah menghasilkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
 - d) **Namun hingga Mei, baru 3 provinsi yang sudah punya akses Regsosek** (Kalimantan Utara, NTB, NTT); sisanya masih proses mengajukan permohonan atau belum mengajukan sama sekali.



- Tindak lanjut dari Musrenbangnas yang lalu adalah mengintegrasikan hasil-hasil kesepakatan atas usulan-usulan daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
- Selanjutnya kita perlu menyelaraskan sasaran-sasaran pembangunan daerah dan nasional tahun 2025 yang sekaligus menjadi input RKP/RKPD 2025, RPJMN/RPJMD 2025-2029, dan RPJPN/RPJPD 2025-2045.
- Keselarasan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional ini akan menjadi awal yang baik bagi orkestrasi transformasi pembangunan daerah dan nasional menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

--- o0o ---

A blue-tinted photograph of several people in business attire holding blue puzzle pieces over a table. The puzzle pieces are being brought together, symbolizing teamwork and collaboration. In the background, there are documents, a calculator, and a pen on the table. The overall mood is professional and positive.

Terima Kasih